MAKALAH

'Ekonomi Moneter Islam Masa Depan'

DISUSUN OLEH:

SULFIAH 90500118047

URMILA AZ ZAHRA 90500119079

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

2021

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Rasulullah SAW. Penulis bersyukur kepada Ilahi Rabbi yang telah memberikan hidayah serta taufik-Nya kepada penulis, sehingga makalah yang telah saya tulis dapat diselesaikan.

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen yang bersangkutan yang telah memberikan kesempatan waktu untuk penyelesaian makalah ini dan dengan limpahan rahmat karunia Allah, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah mata kuliah ini.

Dengan ditulisnya makalah ini, diharapkan para pembaca dapat mengetahui terhadap tentang **Ekonomi Moneter Islam Masa Depan** serta dapat menjadi pengembangan wawasan dan mengerti akan beberapa referensi-referensi dari beberapa sumber.

Kami menyadari bahwa dalam makalah ini masih terdapat kekurangan atau kekeliruan dan kekhilafan. Oleh karena itu, kepada para pembaca dan para pakar, penulis mengharapkan saran dan kritik konstruktif demi kesempurnaan makalah ini. Semoga makalah yang saya susun bermanfaat bagi para pembaca dan menambah ilmu pengetahuan tentang pendidikan.

Enrekang, 4 Desember 2021

Penyusun

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	1
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN	
A.LatarBelakang.....	4
B.Rumusan Masalah.....	5
C.Tujuan.....	5
BAB II PEMBAHASAN	
A.Tinjauan Sistem Moneter Saat Ini.....	6
B. Peluang Penggunaan Uang Emas Sebagai Mata Uang Global.....	14
C.Uang Elektronik Dan Digital Dalam Perspektif Islam.....	23
BAB III PENUTUP	
A.Kesimpulan.....	30
DAFTAR PUSTAKA.....	32

BAB I PENDAHALUAN

A. Latar Belakang

Uang merupakan suatu benda yang memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Uang mempermudah manusia untuk saling memenuhi kebutuhan hidup dengan cara melakukan pertukaran dan perdagangan barang dan jasa. Selain itu, uang berfungsi sebagai standar ukuran nilai harga dan media penyimpanan kekayaan. Dalam skala global, uang memiliki peranan penting dalam aktifitas perekonomian dunia. Uang menjadi media pertukaran barang dan jasa internasional serta uang menjadi dasar dari sistem moneter dunia, bahkan uang juga bisa digunakan untuk membeli dan menguasai sumber daya yang ada di dunia ini.

Islam memperkenalkan kepada manusia lima komponen hidup yang menjadi kepentingan bagi semua manusia. Hukum Islam (*al-Fiqh*), dengan demikian, berfungsi menjaga lima komponen "*al-Kulliyat al-khams*" (lima dasar), yaitu : jiwa, akal pikiran, benda, keturunan dan keyakinan beragama manusia,¹ komponen tersebut membentuk pola hidup yang menjadi pedoman bagi umat Islam. Sedangkan fiqh itu sendiri adalah suatu pola hidup yang ditawarkan oleh syariat Islam dalam pemahaman secara mendalam terhadap hukum dan ketentuan Allah untuk diimplementasikan dalam kehidupan manusia.

Semakin berkembangnya kehidupan masyarakat, maka semakin berkembang pula problematika kehidupan manusia. Problematika tersebut muncul dalam seluruh aspek kehidupan, dan masalah ibadah sampai masalah muamalah, yang terbanyak tentu saja masalah muamalah. Bagi umat Islam semua aspek kehidupan adalah bagian dari ibadah, karena ibadah memiliki dimensi yang sangat luas.²

Semua perubahan yang terjadi dalam masyarakat tidak mungkin terjadi apabila manusia tidak mempunyai kesempatan dan keluasan untuk berpikir dan berkreasi. Karenanya diperlukan berbagai bentuk aturan yang

mengatur bagaimana manusia agar bisa melaksanakan kegiatannya dengan aman, tidak saling mengganggu atau bahkan saling menghancurkan sehingga kesempatan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan menjadi terhambat. Dengan demikian diperlukan peranan hukum yang bertujuan untuk melindungi, mengatur dan merencanakan kehidupan ekonomi sehingga dinamika kegiatan ekonomi dapat diarahkan kepada kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan sistem moneter saat ini ?
2. Bagaimana peluang penggunaan uang emas sebagai mata uang global ?
3. Bagaimana uang elektronik dan digital dalam perspektif islam ?

C. Tujuan Penulisan Makalah

1. Untuk mengetahui tinjauan sistem moneter saat ini
2. Untuk mengetahui peluang penggunaan uang emas sebagai mata uang global
3. Untuk mengetahui uang elektronik dan digital dalam perspektif islam

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Sistem Moneter Saat Ini

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 17-18 Maret 2021 memutuskan untuk mempertahankan BI *7-Day Reverse Repo Rate* (BI7DRR) sebesar 3,50%, suku bunga *Deposit Facility* sebesar 2,75%, dan suku bunga *Lending Facility* sebesar 4,25%. Keputusan ini sejalan dengan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dari meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global, di tengah prakiraan inflasi yang tetap rendah. Untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional lebih lanjut, Bank Indonesia lebih mengoptimalkan kebijakan makroprudensial akomodatif, akselerasi pendalaman pasar uang, dukungan kebijakan internasional, serta digitalisasi sistem pembayaran. Sejalan dengan itu, Bank Indonesia menempuh langkah-langkah kebijakan sebagai tindak lanjut sinergi kebijakan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam Paket Kebijakan Terpadu untuk Peningkatan Pembiayaan Dunia Usaha sebagai berikut:

1. Memperkuat kebijakan nilai tukar Rupiah dengan tetap berada di pasar melalui *triple intervention* untuk menjaga stabilitas nilai tukar yang sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar;
2. Melanjutkan penguatan strategi operasi moneter untuk mendukung *stance* kebijakan moneter akomodatif;
3. Memperluas penggunaan instrumen Sukuk Bank Indonesia (SukBI) pada tenor 1 minggu sampai dengan 12 bulan dalam rangka memperkuat operasi moneter syariah mulai berlaku 16 April 2021;
4. Memperkuat transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) perbankan secara lebih rinci serta berkoordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait untuk mendukung percepatan transmisi kebijakan moneter dan peningkatan kredit/pembiayaan

kepada dunia usaha;

5. Memperkuat kebijakan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM/RIM Syariah) dengan memasukkan wesel ekspor sebagai komponen pembiayaan, serta memberlakukan secara bertahap ketentuan disinsentif berupa Giro RIM/RIMS, untuk mendorong penyaluran kredit/pembiayaan perbankan kepada dunia usaha dan ekspor guna mengakselerasi pemulihan ekonomi;
6. Mempercepat pendalaman pasar uang melalui pengembangan transaksi repo antar pelaku pasar dan penguatan infrastruktur transaksi guna mendukung efektivitas transmisi kebijakan moneter dan manajemen likuiditas sektor keuangan;
7. Memfasilitasi penyelenggaraan promosi perdagangan dan investasi serta sosialisasi penggunaan *Local Currency Settlement* (LCS) bekerjasama dengan instansi terkait. Pada Maret dan April 2021 akan diselenggarakan promosi investasi dan perdagangan di Singapura, Malaysia, Jepang, Amerika Serikat, Australia, Tiongkok, dan Perancis, serta kegiatan sosialisasi penggunaan LCS di Jepang dan Malaysia;
8. Melanjutkan dukungan pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang inklusif dan efisien khususnya UMKM melalui perluasan penggunaan dan fitur *QR Code Indonesian Standard* (QRIS), penyelenggaraan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Karya Kreatif Indonesia (KKI), dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi, termasuk Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (GBBI) dan Gerakan Bangga Berwisata Indonesia (GBWI);
9. Mendukung pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dalam rangka mendorong inovasi, mempercepat dan memperluas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP), serta integrasi ekonomi dan keuangan digital.

Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah dan KSSK, termasuk implementasi Paket Kebijakan Terpadu KSSK, untuk mempercepat penyaluran kredit/pembiayaan dari perbankan kepada dunia usaha pada sektor-sektor prioritas yang mendukung pertumbuhan ekonomi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.

Perekonomian global berpotensi tumbuh lebih tinggi dari prakiraan sebelumnya meskipun belum berjalan seimbang dari satu negara ke negara lain. Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi terjadi di negara-negara yang mampu mengakselerasi vaksinasi Covid-19 serta menempuh stimulus fiskal dan moneter yang besar. Pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2021 diperkirakan akan lebih tinggi dari prakiraan sebelumnya sebesar 5,1%, terutama ditopang lebih tingginya pertumbuhan di Amerika Serikat (AS), Tiongkok, Kawasan Eropa, dan India. Sejumlah indikator dini pada Februari 2021 mengonfirmasi perbaikan ekonomi global yang lebih kuat, seperti *Purchasing Manager's Index* (PMI) manufaktur, keyakinan konsumen, serta penjualan ritel yang terus meningkat. Sejalan dengan perbaikan ekonomi global tersebut, volume perdagangan dan harga komoditas dunia terus meningkat, sehingga mendukung perbaikan kinerja ekspor negara berkembang, termasuk Indonesia. Di AS, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi juga didukung oleh tambahan stimulus fiskal sebesar 1,9 triliun dolar AS yang berlaku sejak 17 Maret 2021 dan rencana tambahan stimulus fiskal sebesar 2 triliun dolar AS pada triwulan IV-2021. Reaksi pasar atas paket kebijakan fiskal yang lebih besar dan prospek pemulihan ekonomi yang lebih cepat di AS tersebut telah mendorong kenaikan yield UST dan ketidakpastian pasar keuangan global, meskipun the Fed diperkirakan belum akan mengubah kebijakan moneternya pada tahun ini. Perkembangan ini berpengaruh terhadap tertahannya aliran modal ke sebagian besar negara berkembang, dan berdampak pada kenaikan yield surat berharga dan tekanan terhadap mata uang di berbagai negara tersebut, termasuk Indonesia.

Perekonomian domestik diperkirakan berlanjut, didorong oleh

pemulihan ekonomi global, implementasi vaksinasi, dan sinergi kebijakan nasional. Perkembangan sejumlah indikator pada Februari 2021 mengindikasikan perbaikan yang terus berlangsung, di tengah mobilitas masyarakat yang meningkat terbatas sejalan dengan masih diberlakukannya pembatasan di sejumlah wilayah. Kinerja ekspor terus meningkat, terutama komoditas manufaktur seperti besi baja, bijih logam, kimia organik, dan mesin listrik, seiring dengan kenaikan permintaan dari negara mitra dagang utama dan perbaikan ekonomi global. Secara spasial, peningkatan kinerja ekspor terjadi di sejumlah wilayah yaitu seperti Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua), Jawa, Sumatera. Selain itu, ekspektasi konsumen, penjualan eceran, dan PMI manufaktur juga menunjukkan perbaikan. Akselerasi program vaksin nasional dan disiplin dalam penerapan protokol Covid-19 diharapkan dapat mendukung proses pemulihan ekonomi domestik. Selain itu, untuk mendorong permintaan domestik lebih lanjut, sinergi kebijakan ekonomi nasional terus diperkuat. Sinergi kebijakan mencakup lima aspek yaitu:

- (i) Pembukaan sektor-sektor produktif dan aman,
- (ii) Akselerasi stimulus fiskal,
- (iii) Penyaluran kredit perbankan dari sisi permintaan dan penawaran,
- (iv) Berlanjutnya stimulus moneter dan makroprudensial, serta

Percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan, khususnya terkait pengembangan UMKM. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 diperkirakan akan meningkat pada kisaran 4,3-5,3%.

Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) diperkirakan tetap baik, sehingga mendukung ketahanan sektor eksternal. Defisit transaksi berjalan diperkirakan tetap rendah, didorong oleh surplus neraca barang yang berlanjut. Neraca perdagangan Februari 2021 mencatat surplus sebesar 2,00 miliar dolar AS, melanjutkan surplus pada bulan sebelumnya sebesar 1,96 miliar dolar AS. Kinerja positif tersebut dipengaruhi oleh

ekspor yang kembali mencatat kenaikan sebesar 8,56% (yoy), terutama ditopang oleh permintaan dari Tiongkok, AS, dan Jepang, serta kenaikan harga komoditas dunia, di tengah berlanjutnya perbaikan impor. Selain sejumlah komoditas manufaktur, peningkatan nilai ekspor juga tercatat pada sejumlah komoditas primer seperti CPO dan batu bara. Sementara itu, aliran masuk investasi portofolio asing ke pasar keuangan domestik relatif tertahan, seiring ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat. Hal ini tercermin dari investasi portofolio yang mencatat *net outflow* sebesar 1,57 miliar dolar AS pada Maret 2021 (hingga 16 Maret), setelah sebelumnya mencatat *net inflow* sebesar 7,14 miliar dolar AS pada periode Januari-Februari 2021. Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Februari 2021 tercatat sebesar 138,8 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan 10,5 bulan impor atau 10,0 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Ke depan, defisit transaksi berjalan diperkirakan tetap rendah yaitu sekitar 1,0%-2,0% dari PDB pada tahun 2021, sehingga mendukung ketahanan sektor eksternal ekonomi Indonesia.

Di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global, pergerakan nilai tukar Rupiah relatif terjaga didukung langkah-langkah stabilisasi Bank Indonesia. Nilai tukar Rupiah pada 17 Maret 2021 melemah 2,20% secara rerata dan 1,16% secara *point to point* dibandingkan dengan level Februari 2021. Pelemahan nilai tukar Rupiah tersebut dipengaruhi oleh kenaikan yield US Treasury (UST) dan menguatnya dolar AS yang kemudian menahan aliran masuk investasi portofolio asing ke pasar keuangan domestik. Dengan perkembangan ini, Rupiah sampai dengan 17 Maret 2021 mencatat depresiasi sekitar 2,62% (ytd) dibandingkan dengan level akhir 2020, relatif lebih rendah dari sejumlah negara *emerging* lain seperti Brazil, Meksiko, Korea Selatan, dan Thailand. Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah sesuai dengan fundamentalnya dan bekerjanya mekanisme pasar, melalui efektivitas operasi moneter dan ketersediaan likuiditas di

pasar.

Inflasi tetap rendah sejalan permintaan yang belum kuat dan pasokan yang memadai. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Februari 2021 tercatat sebesar 0,10% (mtm) atau 1,38% (yoy). Inflasi inti tetap rendah sejalan dengan pengaruh permintaan domestik yang belum kuat, stabilitas nilai tukar yang terjaga, dan konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam mengarahkan ekspektasi inflasi pada kisaran target. Inflasi kelompok *volatile food* melambat seiring pasokan domestik yang meningkat dan permintaan yang belum kuat. Sementara itu, inflasi kelompok *administered prices* meningkat didorong kenaikan tarif di beberapa ruas jalan tol dan kenaikan tarif angkutan udara beberapa maskapai penerbangan. Inflasi pada tahun 2021 diperkirakan tetap terkendali dalam sasaran $3,0\% \pm 1\%$. Ke depan, Bank Indonesia tetap berkomitmen menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah melalui Tim Pengendali Inflasi (TPI dan TPID), guna mengendalikan inflasi IHK sesuai kisaran targetnya.

Sejalan dengan kebijakan moneter akomodatif Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan fiskal Pemerintah untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional, kondisi likuiditas di perbankan dan pasar keuangan tetap longgar. Sejak tahun 2020, Bank Indonesia telah menambah likuiditas (*quantitative easing*) di perbankan sebesar Rp776,87 triliun (5,03% dari PDB), yang terdiri dari Rp726,57 triliun pada tahun 2020 dan sebesar Rp50,29 triliun pada tahun 2021 (per 16 Maret 2021). Sinergi ekspansi moneter Bank Indonesia dengan akselerasi stimulus fiskal Pemerintah terus diperkuat dengan pembelian SBN oleh Bank Indonesia di pasar perdana. Setelah pada tahun 2020 melakukan pembelian dari pasar perdana sebesar Rp473,42 triliun untuk pendanaan APBN 2020, pada 2021 Bank Indonesia melanjutkan pembelian SBN dari pasar perdana untuk pembiayaan APBN Tahun 2021 melalui mekanisme sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia

tanggal 16 April 2020, sebagaimana telah diperpanjang tanggal 11 Desember 2020, hingga 31 Desember 2021. Besarnya pembelian SBN di pasar perdana hingga 16 Maret 2021 sebesar Rp65,03 triliun, terdiri dari sebesar Rp22,90 triliun melalui mekanisme lelang utama dan sebesar Rp42,13 triliun melalui mekanisme *Greenshoe Option (GSO)*. Kondisi likuiditas yang longgar pada Februari 2021 telah mendorong tingginya rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) yakni 32,86% dan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tinggi sebesar 10,11% (yoy). Dari besaran moneter, pertumbuhan besaran moneter M1 dan M2 pada Februari 2021 tetap tinggi, yakni sebesar masing-masing 18,6% (yoy) dan 11,3% (yoy).

Penurunan suku bunga kebijakan moneter dan longgarnya likuiditas mendorong suku bunga terus menurun, meskipun penurunan suku bunga kredit perbankan perlu terus didorong. Longgarnya likuiditas dan penurunan BI7DRR sebesar 150 bps sejak 2020 mendorong rendahnya rata-rata suku bunga PUAB *overnight* sekitar 2,96% selama Februari 2021. Suku bunga deposito 1 bulan juga telah menurun sebesar 189 bps (yoy) ke level 4,06% sejak Januari 2020 hingga Januari 2021. Namun demikian, penurunan suku bunga kredit pada periode yang sama masih cenderung terbatas, yaitu hanya sebesar 78 bps ke level 9,72%. Di tengah penurunan suku bunga BI7DRR sebesar 125 bps (yoy) sampai dengan Januari 2021, SBDK pada periode yang sama hanya turun sebesar 78 bps (yoy). Hal ini menyebabkan *spread* SBDK terhadap BI7DRR cenderung melebar dari sebesar 5,82% pada Januari 2020 menjadi sebesar 6,28% pada Januari 2021. Adapun suku bunga deposito lebih cepat dalam merespons penurunan suku bunga kebijakan, sehingga *spread* antara suku bunga SBDK dan suku bunga deposito 1 bulan juga mengalami kenaikan dari 4,86% menjadi 5,97%. Dari sisi jenis kredit, SBDK kredit mikro tercatat sebesar 13,77%, kredit konsumsi non-KPR 10,71%, kredit ritel 9,63%, kredit konsumsi KPR 9,61%, dan kredit korporasi 9,16%. Dari sisi kelompok bank, SBDK tertinggi hingga Januari 2021 tercatat pada bank-bank BUMN

sebesar 10,80% diikuti oleh BPD 9,79%, BUSN 9,46% dan KCBA 6,58%. Namun demikian, SBDK bank-bank BUMN diperkirakan akan menurun pada bulan Maret 2021 dengan rencana penurunan yang telah diumumkan. Bank Indonesia mengharapkan bank-bank lain juga dapat mempercepat penurunan suku bunga kredit sebagai upaya bersama untuk mendorong kredit/pembiayaan bagi dunia usaha dan pemulihan ekonomi nasional.

Ketahanan sistem keuangan tetap terjaga, meskipun risiko dari berlanjutnya dampak Covid-19 terhadap stabilitas sistem keuangan terus dicermati. Rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) perbankan Januari 2021 tetap tinggi sebesar 24,40%, dan rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*) tetap rendah, yakni 3,17% (bruto) dan 1,03% (neto). Di tengah kondisi likuiditas yang longgar, fungsi intermediasi sektor keuangan belum kuat, tercermin dari kontraksi kredit pada Februari 2021 sebesar 2,15% (yoy) dibandingkan dengan kontraksi 1,92% (yoy) pada Januari 2021. Sehubungan dengan itu, berbagai langkah penguatan terus dilakukan sejalan dengan sinergi kebijakan KSSK, perbankan, dan dunia usaha untuk menjaga optimisme dan mengatasi permasalahan sisi permintaan dan penawaran dalam penyaluran kredit/pembiayaan dari perbankan kepada dunia usaha, dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi nasional. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia terus menempuh kebijakan makroprudensial akomodatif termasuk kebijakan Uang Muka Kredit/Pembiayaan Kendaraan Bermotor dan *Loan to Value/Financing to Value* (LTV/FTV) Kredit/Pembiayaan Properti yang telah diumumkan. Bank Indonesia juga akan mendorong peningkatan kredit/pembiayaan perbankan kepada dunia usaha dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan melalui perluasan komponen pembiayaan dan reaktivasi Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM/RIM Syariah) secara bertahap.

Transaksi Sistem Pembayaran baik tunai maupun nontunai berjalan lancar di tengah tetap pesatnya digitalisasi ekonomi dan keuangan. Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) pada Februari 2021

mencapai Rp783,6 triliun, tumbuh 11,95% (yoy). Di sisi lain, nilai transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM, Kartu Debet, dan Kartu Kredit pada Februari 2021 tercatat Rp579,6 triliun, mengalami kontraksi 4,93% (yoy) sejalan dengan masih terbatasnya mobilitas dan lemahnya permintaan domestik akibat pandemi Covid-19. Meskipun demikian, transaksi ekonomi dan keuangan digital terus tumbuh tinggi sejalan dengan meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat untuk berbelanja daring, meluasnya pembayaran digital dan akselerasi *digital banking*. Pertumbuhan tersebut tercermin dari nilai transaksi Uang Elektronik (UE) pada Februari 2021 sebesar Rp19,2 triliun, atau tumbuh 26,42% (yoy). Volume transaksi *digital banking* juga terus meningkat, pada Februari 2021 tumbuh 36,41% (yoy) mencapai 464,8 juta transaksi dan nilai transaksi *digital banking* yang tumbuh 22,94% (yoy) mencapai Rp2.547,5 triliun. Dengan mempertimbangkan pesatnya perkembangan teknologi, inovasi, serta perluasan dan penguatan ekosistem digital, Bank Indonesia memprakirakan tren digitalisasi masih akan terus berlanjut. Dari sisi kebijakan sistem pembayaran, Bank Indonesia terus mendukung pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan digital, antara lain dengan perluasan akseptasi QRIS melalui implementasi fitur QRIS *Customer Presented Mode* (CPM) serta penggunaan QRIS sebagai salah satu metode pembayaran dalam *e-commerce*. Dalam rangka memperkuat penggunaan Rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di NKRI, Bank Indonesia terus memperluas dan mempercepat edukasi Rupiah dalam rangka mengakselerasi program Cinta Rupiah, Bangga Rupiah, dan Paham Rupiah.

B. Peluang Penggunaan Uang Emas Sebagai Mata Uang Global

1. Strategi Konsep Dinar dalam Perdagangan Internasional

Ide penerapan gold dinar dalam perdagangan internasional diakui memerlukan keputusan politik yang tidak sederhana. Lantaran itu, perlu kesabaran luar biasa untuk terus meyakinkan berbagai pihak, khususnya

negara-negara muslim akhirnya bisa mencapai kesepakatan yang dimaksud.

Agar konsep dinar dapat menjadi mata uang internasional antara negara Muslim, maka perlu beberapa strategi yang harus disiapkan, antara lain dapat ditempuh melalui beberapa tahap, yaitu:

Tahap pertama, negara-negara yang tergabung dalam anggota OKI harus membuat kesepakatan/kompetensi atau peraturan tentang pembayaran transaksi perdagangan internasionalnya baik perdagangan secara bilateral maupun multilateral dengan menggunakan mata uang dinar. Hal ini agar mendorong akselerasi penerapan dinar dalam perdagangan internasional. Karena undangundang atau peraturan merupakan payung hukum dan instrumen utama demi terealisasinya tujuan yang dimaksud.

Tahap kedua, negara-negara yang tergabung dalam anggota OKI harus memulai dengan membuat standar ukuran umum mata uang dinar yang akan digunakan sebagai mata uang tunggal yang perlu dipenuhi dengan mengambil rata-rata persamaan dari negara-negara OKI yang mau bergabung.

Tahap ketiga, negara-negara yang tergabung dalam anggota OKI harus menciptakan suatu lembaga yang akan mengurus dan mengelola kendali moneter yang menjadi embrio yang nantinya akan menjadi Bank Sentral atau Bank Kustodian dari seluruh negara OKI, sebagai contoh sebut saja IDB (Islamic Development Bank). IDB berfungsi mengatur kebijakan umum moneter untuk seluruh negara OKI, mengatur operasi nilai tukar mata uang asing, menyimpan cadangan devisa bagi negara OKI dan mempromosikan mekanisme pembayaran yang stabil antar anggota.

Bank kustodian ini juga bermaksud agar bisa memudahkan memonitor dan memastikan masing-masing anggota memenuhi jumlah minimal yang disyaratkan dari simpanan emasnya. Institusi ini juga akan memastikan fungsi pembayaran dan sekaligus juga berfungsi sebagai pemegang kustodian dari rekening gold dinar.

Selanjutnya, dengan telah dilakukannya beberapa tahap di atas, maka para pemerintah negara OKI sudah semestinya mensosialisasikan kepada para masyarakat khususnya para pengusaha ekspor maupun impor baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini ditujukan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat. Jika mayoritas masyarakat sudah memahami keunggulan mata uang emas ini, maka lambat laun mereka akan menggunakannya untuk keperluan praktis dan mengarah kepada praktik keseharian. Salah satu yang sudah mendapat tempat adalah pembayaran zakat dengan emas.

Selain pembayaran zakat dengan emas, masih banyak potensi penggunaan emas yang tidak saja punya dimensi religius, tapi juga investatif. Salah satunya yang bisa dikembangkan adalah penggunaan emas sebagai alat pembayaran sekaligus media investasi untuk haji. Selain harga jualnya yang cenderung terus meningkat, investasi ini juga termasuk likuid.

Dalam skup yang lebih besar, penggunaan dinar bisa dilakukan untuk pembayaran transaksi minyak. Negara pengekspor minyak seperti Iran berpeluang menerapkan skim ini. Implementasinya bisa jadi lebih sederhana karena transaksi lebih akan melibatkan hubungan negara dengan negara (G to G), bukan swasta kepada swasta, sehingga transaksinya relatif bisa lebih simpel.

Penggunaan dinar sebagai alat pembayaran minyak tak pelak akan langsung mengubah peta keseimbangan moneter internasional, karena negara-negara net importers mau tidak mau harus menukarkan dolarnya dengan dinar. Secara ekonomi, penukaran ini lebih menguntungkan mereka karena ini kesempatan untuk bisa mendiversifikasi cadangan mata uang mereka yang sebelumnya didominasi dolar AS ke dalam dinar yang tidak perlu di-hedge karena memiliki nilai intrinsik.

2. Implementasi Penggunaan Dinar dalam Perdagangan Internasional

Untuk menjadikan dinar sebagai mata uang global diperlukan

berbagai langkah dan strategi. Kehadiran dinar dalam sistem perdagangan dan moneter dunia dimaksudkan untuk menggantikan uang fiat dan menjadi alternatif bagi negara-negara berkembang untuk menghindari dominasi perekonomian negara-negara maju. Untuk menggantikan peran uang fiat dalam perekonomian diperlukan penerapan dinar secara bertahap, langkah demi langkah bukan dengan perubahan secara drastis. Salah satu langkah yang dilakukan dalam penerapan dinar tersebut adalah dengan menjadikan dinar sebagai alat transaksi perdagangan barang dan jasa internasional, baik perdagangan multilateral maupun bilateral.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penerapan dinar dalam perdagangan internasional, antara lain:

a. Peran Dinar dalam Perdagangan

Penggunaan dinar tidak ditujukan untuk menggantikan peran mata uang domestik, tetapi hanya digunakan untuk pembayaran atas transaksi perdagangan barang dan jasa luar negeri. Uang domestik tetap diperlukan sebagai alat transaksi domestik. Dinar tidak diwujudkan dalam bentuk fisik, tetapi diukur dalam ukuran harga emas. Jika satu dinar sama dengan satu ounce emas dan satu ounce emas setara dengan \$290, maka satu dinar sama dengan \$290. Emas tersebut bisa dihargakan dengan nilai mata uang negara lain yang ditetapkan oleh kedua negara.

Pembayaran tidak dilakukan dengan mentransfer dinar dari satu negara ke negara lain, tetapi hanya dengan mentransfer ekuivalen emasnya ke bank kustodian yang telah disepakati. Hal ini ditujukan untuk menghindari kesulitan untuk mentransfer emas dalam bentuk fisik serta memberikan kemudahan bagi negara yang tidak memiliki sumber daya emas yang cukup.

b. Penggunaan Dinar Emas

Dinar tersebut akan digunakan dalam transaksi perdagangan multilateral maupun bilateral. Perdagangan multilateral melibatkan beberapa negara dalam transaksi perdagangan seperti ekspor dan impor yang terjadi antara Malaysia dengan Arab Saudi dan Indonesia. Sedangkan

transaksi bilateral melibatkan dua negara dalam perdagangan barang dan jasa, seperti perdagangan antara Indonesia dengan Malaysia. Perdagangan bilateral tidak hanya terbatas pada negara yang ada dalam satu regional, tetapi juga bisa dengan negara yang berada di luar regionalnya, seperti perdagangan antara Indonesia dengan Australia atau Indonesia dengan Amerika Serikat.

Pada konferensi internasional tahun 2002 di Kuala Lumpur tentang Stable and Just Global Monetary Systems, Perdana Menteri Malaysia Dr. Mahatir Muhammad menjelaskan tentang mekanisme pelaksanaan perdagangan dengan dinar. Ketika terjadi perdagangan antara Malaysia dengan Arab Saudi, dimana dalam kurun waktu 3 bulan, Malaysia mengekspor ke Arab Saudi sebesar 2 juta dinar dan Arab Saudi mengekspor ke Malaysia sebesar 1,8 juta dinar.

3. Peraturan tentang Penerapan Dinar dalam Perdagangan Internasional

Mengimplementasikan dinar sebagai alat transaksi perdagangan internasional harus merujuk kepada peraturan dan undang-undang yang membolehkan dinar yang terbuat dari emas bisa digunakan sebagai alat pembayaran. Setidaknya, ada tiga aturan (legal issues) yang berkenaan dengan menggunakan dinar dalam perdagangan internasional, yaitu:

a. International Legal Impediments

Ada beberapa peraturan yang berkaitan dengan penerapan dinar dalam perdagangan internasional dalam Articles of Agreement of the International Monetary Fund. Pada 1945 salah satu aturan yang ditetapkan IMF adalah sistem Par value yang mengharuskan negara-negara anggota mengkonversikan mata uang mereka seperti dolar yang di-peg kepada emas sebesar 1/35 per ons emas. Setelah sistem par value berakhir pada tahun 1971, negara anggota mengadopsi aturan yang dibuat IMF pada tahun 1976 the Second Amendment to the Article Of Agreement yang baru efektif digunakan pada tahun 1978 hingga saat ini. Dalam aturan tersebut negara anggota dibolehkan untuk mengkonversikan mata uangnya

terhadap mata uang lain selain emas. Beberapa negara ada yang mengkonversikan mata uangnya dengan Special Drawing Right (SDR) yang dibuat IMF. Sebagian lainnya ada yang membiarkan mata uangnya mengambang berdasarkan permintaan dan penawaran internasional. Walaupun setiap negara bebas menentukan mata uang yang menjadi standar nilai tukarnya, setiap negara dilarang untuk melakukan manipulasi nilai tukar atau sistem moneter internasional yang ditujukan untuk mengambil keuntungan dari persaingan yang tidak fair dengan negara lain. Setiap negara diharuskan untuk berkolaborasi dengan pendanaan dan pembiayaan dari IMF untuk mempromosikan stabilitas nilai tukar dan menghindari perubahan persaingan nilai tukar. Negara yang membiarkan mata uangnya mengambang bebas diharuskan untuk melakukan intervensi nilai tukarnya untuk mengatasi perubahan nilai tukar yang tajam dan fluktuasi nilai tukar. Berdasarkan Articles IV the Obligations Regarding Exchange Arrangements berisikan tentang nilai tukar hanya dikonversikan kepada SDR atau kepada mata uang negara lain selain emas. Sekilas, aturan tersebut terlihat melarang dan membatasi penggunaan emas sebagai sebuah perjanjian nilai tukar (exchange arrangements). Tetapi dinar yang akan digunakan dalam perdagangan internasional bukan uang sebuah negara yang ditopang dengan emas (backed by gold). Kehadiran dinar dalam perdagangan internasional tidak ditujukan untuk menjadikan dinar sebagai mata uang sehari-hari semua negara, tetapi hanya digunakan untuk menjadi alat transaksi perdagangan bilateral. Pembayaran dengan dinar dilakukan dengan mentransfer ekuivalen dinar ke Account negara peserta yang ada di bank kustodian. Dalam aturan yang sama dalam Articles IV dinyatakan bahwa kondisi ekonomi internasional tertentu, mengizinkan sebuah negara untuk memperkenalkan sistem perjanjian nilai tukar yang berdasarkan atas stabilitas.

b. Financial Infrastructure

Lembaga keuangan adalah salah satu faktor yang akan menyukseskan implementasi dinar sebagai alat transaksi perdagangan

internasional. Lembaga keuangan seperti perbankan harus siap dengan berbagai aturan yang mendukung penggunaan dinar dan menyesuaikan sistem operasionalnya. Untuk mewujudkan itu, diperlukan peran dan aturan yang mendukung industri perbankan untuk berperan dalam perdagangan bilateral. Dalam hal ini, bank sentral selaku otoritas moneter akan menjadi lembaga yang mengawasi dan mengatur mekanisme sistem perbankan nasional.

c. Dispute Settlement

Untuk menghindari perselisihan perdagangan, maka diperlukan sebuah mekanisme penyelesaian (dispute settlement) yang bisa mengatasi perselisihan dagang antar negara ataupun sektor swasta. Saat ini, aturan tentang perselisihan telah ditetapkan oleh WTO yang dinamakan dengan Dispute Settlement Mechanism. WTO telah mengeluarkan beberapa persetujuan, seperti General Agreement on Tariffs and trade, General Agreement on Trade in Services dan Agreement on Trade-Related Aspects of Property Rights. Setiap dari aturan tersebut memiliki tiga tujuan utama, yaitu:

1. Untuk membantu perdagangan berjalan secara bebas;
2. Untuk mencapai liberalisasi dengan cara negosiasi; dan
3. Untuk mengatur perselisihan perdagangan (settling payment).

Proses penyelesaian perselisihan tersebut telah diatur dalam the Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement on Disputes (DSU). Di samping peraturan yang ditetapkan oleh WTO, perdagangan secara bilateral juga membutuhkan lembaga-lembaga yang membantu dalam penyelesaian masalah-masalah perdagangan seperti lembaga mediasi, arbitrase dan konsiliasi. Kehadiran lembaga tersebut diharapkan bisa membantu kelancaran dan menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul dari perdagangan tersebut.

4. Dampak Penggunaan Dinar dalam Perdagangan Internasional

Penggunaan dinar merupakan suatu solusi atas perekonomian dunia yang menggunakan uang fiat. Penggunaan uang fiat menimbulkan

ketidakstabilan perekonomian dunia, untuk mengatasi hal itu dibutuhkan mata uang yang lebih stabil yaitu dinar emas. Pada tahun 1250 M / 648 H di negara Mesir, dinar yang dijadikan sebagai dasar moneter pernah dipengaruhi oleh penggunaan uang fulus yaitu uang campuran dari kuningan dan tembaga. Penggunaan uang fulus dan ditambah oleh kondisi perekonomian yang buruk telah menyebabkan harga yang tidak stabil. Untuk mengatasi hal tersebut Al-Maqrizi (768-845 H) dalam bukunya Ighosatul Ummah bi Kasyfil Ghummah menjelaskan kondisi tersebut secara terperinci serta memberikan jalan keluar bagi kondisi perekonomian Mesir pada waktu itu. Di antara pemikiran Al-Maqrizi tersebut adalah:

- a. Hanya dinar dan dirham yang bisa digunakan sebagai uang
- b. Menghentikan penurunan nilai uang (debasement of money)
- c. Membatasi penggunaan uang fulus

Menurut Al-Maqrizi untuk mengatasi kondisi tersebut, dinar dan dirham harus kembali digunakan dalam perdagangan barang dan jasa seperti pembayaran upah para pekerja. Untuk mendukung penggunaan dinar dan dirham tersebut maka pemerintah harus menghentikan penurunan nilai uang (debasement of money) serta membatasi penggunaan uang fulus hanya untuk transaksi dalam skala kecil dan hanya untuk transaksi kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Sedangkan dinar dan dirham digunakan untuk transaksi dalam skala besar seperti perdagangan luar negeri dan transaksi domestik lainnya. Pada saat ini, peran uang fulus sudah digantikan oleh uang fiat yang digunakan untuk semua transaksi perdagangan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Penggunaan dinar merupakan suatu solusi untuk mengatasi berbagai dampak perekonomian yang ditimbulkan oleh penggunaan uang fiat dalam perekonomian dunia.

Dr. Ahmad Hasan dalam bukunya Al-Awraq an-Naqdiyyat fi al-Iqtishadi allslamiy menjelaskan bahwa setelah berakhirnya perang dunia I, setiap negara memberlakukan peraturan dan pengawasan ketat terhadap

perdagangan dunia untuk menurunkan jumlah impor barang dan komoditi seperti pemberlakuan pajak dan cukai. Setiap negara berusaha untuk mendorong peningkatan ekspor yang kemudian menyebabkan perbedaan harga-harga di setiap negara.

Ketika perdagangan menggunakan emas, maka indeks harga akan mempertahankan kesesuaian, karena menggunakan sistem emas sangat berperan penting untuk menjaga stabilitas harga di berbagai negara. Sebagai contoh, terjadinya kerjasama dagang antara Suriah dengan Prancis dengan menggunakan sistem emas. Suriah mengimpor komoditi dalam jumlah besar dari Prancis, hal ini akan menyebabkan keluarnya emas dari Suriah menuju Prancis dan persediaan emas akan menipis di Suriah. Saat itu harga-harga akan mengalami penurunan di Suriah. Ketika harga-harga komoditi di Suriah menurun, negara lain akan melakukan impor dari Suriah dan saat itu pula emas-emas kembali masuk dan menguat di Suriah. Tetapi, ketika perdagangan dunia tidak lagi berjalan dengan bebas, keberadaan uang emas digantikan dengan uang kertas yang berakibat pada perbedaan indeks harga-harga.

Menurut Hafiz Majdi, Dodik Siswantoro dan J.A. Brozovsky (Stable and Just Global Monetary System, 2002), penggunaan dinar yang dilakukan oleh kedua negara dalam perdagangan bilateral akan menyebabkan penyesuaian otomatis terhadap neraca pembayaran (balance of payment) kedua negara. Contoh sederhananya adalah ketika salah satu negara mengekspor barang ke negara lainnya, maka negara tersebut akan memiliki lebih banyak dinar emas dan jumlah barang yang lebih sedikit. Hal ini akan menyebabkan terangkatnya harga barang karena adanya ekspor dan dengan tingkat harga yang lebih tinggi serta melakukan penyesuaian otomatis terhadap perbedaan pada neraca pembayaran. Dampak implementasi gold dinar dalam perdagangan internasional diproyeksikan akan mendatangkan banyak manfaat.

Pertama, mengurangi dampak volatilitas yang disebabkan oleh

fluktuasi mata uang. *Kedua*, trader tidak perlu lagi melakukan hedging. *Ketiga*, transaksi semakin efisien karena semakin banyak negara yang bergabung, hanya diperlukan gold dinar yang relatif kecil untuk volume perdagangan yang difasilitasi. *Keempat*, gold dinar akan berperan seperti mata uang bersama (common Currency) yang berimplikasi akan mengurangi biaya transaksi. *Kelima*, keuntungan politis di mana para pendukung gold dinar akan menjadi blok yang solid yang diperhitungkan kiprahnya.

5. Keuntungan dari Penggunaan Dinar dalam Perdagangan Internasional

Penggunaan dinar dalam perdagangan internasional akan memberikan berbagai keuntungan, diantaranya:

- a. Mengurangi dan menghapus risiko nilai tukar. Risiko yang ditimbulkan dari perubahan nilai tukar akan mempengaruhi aktivitas ekonomi dunia terutama perdagangan internasional. Kehadiran dinar akan menghapus setiap risiko yang ditimbulkan dari nilai tukar karena dinar adalah mata uang yang stabil dan menguntungkan bagi setiap negara yang melakukan perdagangan, walaupun harga nilai emas berfluktuasi, tetapi tingkat perubahannya lebih kecil dibandingkan dengan tingkat fluktuasi uang kertas saat ini.
- b. Penggunaan dinar akan mengurangi terjadinya spekulasi, manipulasi dan arbitrase terhadap mata uang nasional. Ketika tiga negara seperti Malaysia, Indonesia dan Brunei Darussalam melakukan perdagangan maka akan ada tiga jenis mata uang. Tetapi dengan menjadikan dinar sebagai mata uang tunggal dalam perdagangan, maka tidak akan ada spekulasi atau arbitrase yang terjadi dalam perdagangan tersebut.

Pada prakteknya, situasi ekonomi dan politik sebuah negara akan mempengaruhi nilai tukar mata uangnya dan akan berpengaruh pada pasar dan aktivitas ekonomi, tetapi dengan dinar sebagai mata uang global, hal tersebut tidak akan berpengaruh signifikan karena dinar bukan milik suatu negara tertentu.

- c. Penggunaan dinar akan mengurangi biaya transaksi perdagangan (transaction Cost) dan meningkatkan perdagangan. Jumlah dinar yang sedikit akan bisa menutupi transaksi dalam jumlah besar serta memberikan peluang kepada negara yang tidak memiliki cadangan devisa yang cukup sekalipun.
- d. Penggunaan dinar dalam perdagangan akan meningkatkan perdagangan yang pada akhirnya akan meningkatkan kerjasama antar negara peserta. Di samping itu, penggunaan dinar akan mempengaruhi kondisi mata uang domestik yang pada akhirnya akan mempengaruhi sistem moneter nasional.
- e. Penggunaan dinar dalam perdagangan internasional akan mengurangi Sovereignty (kekuasaan). Dengan sistem perdagangan uang fiat saat ini telah memberikan peluang dan ruang kepada negara-negara maju untuk menguasai perekonomian dunia dan memperbesar jurang antara negara kaya dengan negara miskin. Penggunaan dinar akan mengurangi ketergantungan negara berkembang dan negara miskin terhadap perekonomian negara maju, mengingat sebagian besar sumber daya alam di dunia ini berada di negara-negara berkembang.

C. Uang Elektronik Dan Digital Dalam Perspektif Islam

1. Pengertian Uang Elektronik

Secara yuridis menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik, Uang Elektronik adalah alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor dahulu oleh pemegang kepada penerbit, yang tersimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip, dan nilai uang tersebut bukan merupakan simpanan serta digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Dalam fatwa DSN-MUI yang dimaksud dengan Uang elektronik (electronic money) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur berikut: diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu

kepada penerbit, jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi, jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan, digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.

2. Macam-Macam Uang Elektronik

Berdasarkan media penyimpanannya, saat ini Uang Elektronik dibedakan atas dua jenis yaitu:

- a. Uang Elektronik yang Nilai Uang Elektroniknya selain dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh Penerbit juga dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh Pemegang. Media elektronik yang dikelola oleh Pemegang dapat berupa chip yang tersimpan pada kartu, stiker, atau harddisk yang terdapat pada personalcomputer milik Pemegang.
- c. Uang Elektronik yang Nilai Uang Elektroniknya hanya dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh Penerbit. Dalam hal ini Pemegang diberi hak akses oleh Penerbit terhadap penggunaan Nilai Uang Elektronik tersebut.

Berdasarkan masa berlaku medianya, uang elektronik dibedakan kedalam dua bentuk:

- a. Reloadable. Uang elektronik dengan bentuk reloadable adalah uang elektronik yang dapat di lakukan pengisian ulang, dengan kata lain, apabila masa berlakunya sudah habis dan atau nilai uang elektroniknya sudah habis terpakai, maka media uang elektronik tersebut dapat digunakan kembali untuk di lakukan pengisian ulang
- b. Disposable. Uang elektronik dengan bentuk disposable adalah uang elektronik yang tidak dapat diisi ulang, apabila masa berlakunya sudah habis dan/atau nilai uang elektroniknya sudah habis terpakai, maka media uang elektronik tersebut tidak dapat digunakan kembali untuk dilakukan pengisian ulang.

Berdasarkan Berdasarkan jangkauan penggunaannya, uang

elektronik dibedakan menjadi:

- a. Single Purpose. Singlepurpose adalah uang elektronik yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari satu jenis transaksi ekonomi, misalnya uang elektronik yang hanya dapat digunakan untuk pembayaran tol atau uang elektronik yang hanya dapat digunakan untuk pembayaran transportasi umum.
- b. Multi Purpose. Multipurpose adalah uang elektronik yang digunakan untuk melakukan berbagai pembayaran atas kewajiban pemegang kartu terhadap berbagai hal yang dilakukannya. Contohnya yaitu suatu uang elektronik yang dapat digunakan dalam beberapa jenis transaksi seperti penggunaan uang elektronik untuk pembayaran tol, dapat juga digunakan untuk membayar telepon, jasa transportasi, pembayaran pada minimarket dan lainlain cukup menggunakan satu kartu.

Berdasarkan Pencatatan Data Identitas Pemegang, Uang Elektronik dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

- a. Uang elektronik yang data identitas pemegangnya terdaftar dan tercatat pada Penerbit (registered)
- b. Uang Elektronik yang data identitasPemegangnya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada Penerbit (unregistered).

3. Dasar Hukum Uang Elektronik

Kemajuan teknologi perdagangan dan bisnis yang menggunakan media elektronik yang akhir-akhir ini memang semakin berkembang dan marak di indonesia, Kemajuan teknologi juga merupakan faktor pendorong dari fungsi produksi, dapat dikatakan demikian karena jika suatu teknologi yang digunakan lebih modern maka hasil produksi yang akan tercapai akan menghasilkan barang atau jasa yang lebih banyak dan lebih efisien atau efektif. Hal ini pun mejadi perhatian masyarakat dari sudut pandang syariah (hukum islam) lebih dari itu, ini menjadi suatu tantangan bagi hukum islam dimana harus menjawab secara cepat dan tepat, pada dasarnya semua hal dalam bermuamalah adalah boleh sesuai dengan kaidah fiqih :

Pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya atau meniadakan kebolehan. Maksud prinsip ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewamenyewa, gadai, kerja sama (mudharabah dan Musyarakah), perwakilan, dan lain-lain. Kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, dan riba.

Islam tidak menafikan apalagi melarang bentuk teknologi selagi tidak bertentangan dengan ajarannya. Lebih dari itu, Al-Quran justru memberitahu bahwa manusia adalah khalifah di atas muka bumi dan Allah menempatkan posisi alam ini untuk digunakan oleh manusia dengan usaha-usahanya yang baik. Sebagaimana firman Allah SWT

“Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu”. (al-Baqarah 2: 29)

Dalam surat lain Allah SWT menjelaskan:

“Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezeki untukmu; dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu, berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai”. (Ibrahim 14: 32)

Lebih spesifik, beberapa pendapat ulama kontemporer yang menyatakan boleh secara implisit mengenai uang (naqd) sebagai alat atau media baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya yang dalam literatur fiqh disebut dengan tsaman atau nuqud (jamak dari naqd). Pendapat tersebut sebagai berikut :

“Segala sesuatu yang boleh diperjualbelikan boleh digunakan sebagai alat bayar, dan tidak terdapat satu nash pun yang menyatakan bahwa uang harus terbuat dari emas dan perak”

Ibnu Taimiyah dalam Kitab Majmu' al-Fatawa berpendapat

"Adapun dinar dan dirham, maka tidak ada batasan secara alami maupun

secara syar'i, tapi rujukannya adalah pada kebiasaan ('adah) dan kesepakatan. Hal itu karena pada dasarnya tujuan orang (dalam penggunaan dinar dan dirham) tidak berhubungan dengan substansinya, tetapi tujuannya adalah agar dinar dan dirham menjadi standar bagi objek transaksi yang mereka lakukan. Fisik dinar dan dirham tidaklah dimaksudkan (bukan tujuan), tetapi hanya sebagai sarana untuk melakukan transaksi dengannya. Oleh karena itu, dinar dan dirham (hanya) berfungsi sebagai tsaman (harga, standar nilai). Berbeda dengan harta yang lain (barang), barang dimaksudkan untuk dimanfaatkan fisiknya. Oleh karena itu, barang harus diukur dengan perkara-perkara (ukuran-ukuran) yang bersifat alami atau syar'i. Sarana semata yang fisik maupun bentuknya bukan merupakan tujuan boleh digunakan untuk mencapai tujuan, seperti apa pun bentuknya. Uang didalam literatur fiqh disebut dengan tsaman atau nuqud didefinisikan oleh para ulama, antara lain, sebagai berikut:

"naqd (uang) adalah segala sesuatu yang menjadi media pertukaran dan diterima secara umum, apa pun bentuk dan dalam kondisi seperti apa pun media tersebut."

"Naqd adalah sesuatu yang dijadikan harga (tsaman) oleh masyarakat, baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya, dan diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas."

Telah kita ketahui bersama bahwa kandungan Maqâsid Syarī'ah atau tujuan hukum islam adalah untuk kemaslahatan ummat manusia. Menurut Al-Syatibi tidak adasatupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Pernyataan tersebut menegaskan bahwakemaslahatan merupakan tujuan atau hasil yang diraih oleh Maqasid Syarī'ah. Karena sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.

4. Akad-akad dalam Uang Elektronik Syarī'ah

Uang elektronik boleh digunakan sebagai alat pembayaran dengan mengikuti ketentuan dan akad-akad sebagai berikut. Akad wadi'ah dan

akad qardh, akad ini diperuntukan antara penerbit dan pemegang uang

1) Akad wadi'ah. Telah kita ketahui bersama bahwa akad ini terbagi menjadi dua, yaitu wadi'ah yad al-amanah dan al-dhamanah. dari pembagian tersebut, maka dapat diketahui wadi'ah yang paling mungkin diimplementasikan di lembaga keuangan syariah adalah wadi'ah yad al-dhamanah. Hal ini disebabkan dalam wadi'ah tersebut, lembaga keuangan syariah diperkenankan untuk memberdayakan harta atau uang yang dititipkan kepadanya.⁴⁰ Dalam hal uang elektronik akad ini berlaku dengan ketentuan dan batasan:

- a) Jumlah nominal uang elektronik bersifat titipan yang dapat diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja
- b) Jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh penerima titipan (penerbit), kecuali atas izin pemegang kartu.
- c) Dalam hal jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan digunakan oleh penerbit atas izin pemegang kartu, maka akad titipan (wadi'ah) berubah menjadi akad pinjaman (qardh), dan tanggung jawab penerima titipan sama dengan tanggung jawab dalam akad qardh.
- d) Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana titipan dari pemegang kartu (dana float).
- e) Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

2) Akad qardh. Peraturan Bank Indonesia No 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan PBI Nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dalam PBI tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan qardh adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka tertentu. Dalam hal ini akad qardh berlaku dengan ketentuan dan batasan:

- a) Jumlah nominal uang elektronik bersifat hutang yang dapat diambil

digunakan oleh pemegang kapan saja.

- b) Penerbit dapat menggunakan (menginvestasikan) uang hutang dari pemegang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan.
- c) Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana pinjaman (utang) dari pemegang kartu (dana float).
- d) Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

b. Akad yang dapat digunakan penerbit dengan para pihak dalam penyelenggaraan uang elektronik (prinsipal, acquirer), Pedagang (merchant) penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesaian akhir adalah akad ijarah, akad ju'alah, dan akad wakalah bi alujrah.

- 1) Akad yang digunakan akad ijarah, Akad Ijarah dapat diimplementasikan pada uang elektronik dalam hal terdapat pelayanan jasa dan/atau sewa yang dilakukan oleh penyelenggara uang elektronik. Dalam hal demikian, Penyelenggara dapat dimungkinkan untuk memperoleh imbalan jasa (ujroh) atas pelayanan jasa dan/atau sewa yang dilakukannya.
- 2) Akad ju'alah, maka berlaku ketentuan dan batasan akad ju'alah sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 62/DSNMUU/XII/2007 tentang Akad Ju'alah.
- 3) Akad wakalah bi al-ujrah, Menurut ulama Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa wakaalah adalah penyerahan kewenangan terhadap sesuatu yang boleh dilakukan sendiri dan bisa diwakilkan kepada orang lain, untuk dilakukan oleh wakil tersebut selama pemilik kewenangan asli masih hidup.

Dalam hal akad yang digunakan akad wakalah bi al-ujrah, maka berlaku ketentuan dan batasan akad wakalah bi al-ujrah sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 113/DSNMUI/IX/2017 tentang Wakalah bi al-Ujrah. Akad Wakalah dapat diimplementasikan pada uang elektronik dalam hal penerbit bekerjasama dengan pedagang dan/atau pihak lain sebagai agen penerbit, dalam hubungan ini, pedagang dan/atau pihak lain

tersebut dapat dimungkinkan untuk mendapat imbalan (ujroh) dari penerbit atas jasa perwakilan syangdilakukannya.

c. Akad yang dapat digunakan antara penerbit dengan agen layanan keuangan digital adalah akad ijarah, akad ju'alah, dan akad wakalah bi al-ujrah.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

konsep dinar dapat menjadi mata uang global antara negara Muslim, maka perlu beberapa strategi yang harus disiapkan, antara lain dapat ditempuh melalui beberapa tahap, yaitu:

Tahap pertama, negara-negara yang tergabung dalam anggota OKI harus membuat kesepakatan/kompetensi atau peraturan tentang pembayaran transaksi perdagangan internasionalnya baik perdagangan secara bilateral maupun multilateral dengan menggunakan mata uang dinar. Hal ini agar mendorong akselerasi penerapan dinar dalam perdagangan internasional. Karena undangundang atau peraturan merupakan payung hukum dan instrumen utama demi terealisasinya tujuan yang dimaksud.

Tahap kedua, negara-negara yang tergabung dalam anggota OKI harus memulai dengan membuat standar ukuran umum mata uang dinar yang akan digunakan sebagai mata uang tunggal yang perlu dipenuhi dengan mengambil rata-rata persamaan dari negara-negara OKI yang mau bergabung.

Tahap ketiga, negara-negara yang tergabung dalam anggota OKI harus menciptakan suatu lembaga yang akan mengurus dan mengelola kendali moneter yang menjadi embrio yang nantinya akan menjadi Bank Sentral atau Bank Kustodian dari seluruh negara OKI, sebagai contoh sebut saja IDB (Islamic Development Bank). IDB berfungsi mengatur kebijakan umum moneter untuk seluruh negara OKI, mengatur operasi nilai tukar mata uang asing, menyimpan cadangan devisa bagi negara OKI dan mempromosikan mekanisme pembayaran yang stabil antar anggota.

Kemajuan teknologi perdagangan dan bisnis yang menggunakan media elektronik yang akhir-akhir ini memang semakin berkembang dan

marak di Indonesia, Kemajuan teknologi juga merupakan faktor pendorong dari fungsi produksi, dapat dikatakan demikian karena jika suatu teknologi yang digunakan lebih modern maka hasil produksi yang akan tercapai akan menghasilkan barang atau jasa yang lebih banyak dan lebih efisien atau efektif. Hal ini pun menjadi perhatian masyarakat dari sudut pandang syariah (hukum Islam) lebih dari itu, ini menjadi suatu tantangan bagi hukum Islam dimana harus menjawab secara cepat dan tepat, pada dasarnya semua hal dalam bermuamalah adalah boleh sesuai dengan kaidah fiqh :

Pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya atau meniadakan kebolehan. Maksud prinsip ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewamenyewa, gadai, kerja sama (mudharabah dan Musyarakah), perwakilan, dan lain-lain. Kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, dan riba.

DAFTAR PUSTAKA

M. Luthfi Hamidi, *Gold Dinar Sistem Moneter Global yang Stabil dan Berkeadilan* (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2007), Cet. 1, h. 17.

M. Luthfi Hamidi, *Gold Dinar Sistem Moneter Global yang Stabil dan Berkeadilan* (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2007), Cet. 1, h. 102-103.

Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), Cet. 1, h. 118-119.

Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik hingga Kontemporer*

(Jakarta: Pustaka Asatruss, 2005), Cet. 1, h. 222.

Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami Telaah Konfrehensif Sistem Keuangan Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 49.

Solikin dan suseno, 2002, uang: pengertian, penciptaan, dan peranannya dalam perekonomian ,pusat pendidikan dan studi kebanksentralan bank indonesia